KETERKAITAN ANTARA JUMLAH PENGUSAHA KENA PAJAK DAN REALISASI PENYETORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BERDASARKAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

(Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega Tahun 2015-2017)

Pembimbing:
Adi Rachmanto

Disusun Oleh:
Julius C. Pardede
21114060

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Komputer Indonesia
Email: julius.pardede@gmail.com

ABSTRACT

This research was conducted at the KPP Pratama Bandung Tegallega. Problems or phenomena contained in the Bandung Tegallega Primary Tax Office are several months when the number of Taxable Entrepreneurs has increased, the realization of value added tax revenues decreased in the same month and vice versa when the number of taxable entrepreneurs decreased, value added tax revenues increased. This condition also occurs in the Notice of Period against the receipt of Value Added Tax.

The method used in this research is descriptive and verifikatif method. Descriptive method is used to find out the description of the variable Number of Taxable Entrepreneurs, Advisory Notification Letter, and acceptance of Value Added Tax, while verifikatif to determine the effect of Number Taxable Entrepreneurs and Advisory Notification Letter against acceptance of Value Added Tax.

The results of this study indicate that the Number of Taxable Entrepreneurs partially significant effect on the acceptance of Value Added Tax on Tax Office Primary Bandung Tegallega with 36.8% influence. Advisory Notification Letter by partial significant effect on Value Added Tax at Tax Office Primary Bandung Tegallega with the influence of 24.5%.

Keywords: Number of Taxable Entrepreneurs, Notice of Period, and Value Added Tax

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Negara berkembang adalah negara yang selalu melaksanakan pembangunan nasional. Indonesia sebagai negara berkembang juga berupaya melakukan pembangunan nasioanal dengan semaksimal mungkin untuk mensejahterahkan rakyat baik secara materil ataupun secara spriritual. Kegiatan pembangunan dapat dilaksanakan apabila mempunyai dana yang memadai dan salah satu penerimaan negara yang digunakan untuk mendanai pembangunan tersebut adalah penerimaan pajak. Pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang terbilang besar dan sangat berpengaruh terhadap peningkatan pembangunan dan menjalankan roda pemerintahan. Oleh karena itu, dari sektor pajak masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi dengan aktif dalam mewujudkan pembangunan yang nyata. (Waluyo, 2014: 2).

Pajak dapat dikatakan iuran yang dipaksakan dan terutang oleh wajib pajak tetapi hasilnya dapat dinikmati secara langsung oleh wajib pajak berupa pembangunan yang diberikan oleh pemerintah. Dengan kata lain, pajak

berfungsi untuk memenuhi biaya-biaya yang digunakan pemerintah untuk menjalankan roda pemerintahannya. Maka dari itu, pajak tidak boleh disalahgunakan untuk sesuatu di luar dari kepentingan negara. Tugas negara dalam memungut pajak untuk pemenuhan tujuan pembangunan mengakibatkan ini menjadi kegiatan yang berulang-ulang setiap tahunnya. Sebagai bentuk penerimaan negara yang utama, pemerintah selalu berusaha menghimpun dana sebanyak-banyaknya dan memasukkannya ke kas negara. Untuk menjaga system perpajakan, pemerintah juga selalu melakukan penyempurnaan terhadap peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan sebagainya. (Siti Resmi, 2016: 10).

Dari berbagai jenis perpajakan yang ada di Indonesia, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu penerimaan terbesar negara dari sektor pajak. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah jenis pajak yang dikenakan atas penggunaan barang dan jasa yang mengalami pertambahan nilai. Biaya yang digunakan untuk mendapatkan dan mempertahankan laba termasuk modal, sewa, dan upah kerja, dan laba perusahaan adalah faktor nilai tambah tersebut. Jadi nilai tambah diperoleh dalam kegiatan industri maupun perdagangan, bukan diperoleh dari perubahan bentuk dan sifat barang. (Siti Resmi: 2016: 112).

Subjek dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP). Mereka wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang. Dengan penjelasan di atas beberapa ahli menyimpulkan semakin banyaknya pengusaha yang dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan selanjutnya memenuhi kewajibannya untuk melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) maka akan menambah potensi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). (Siti Kurnia Rahayu, 2017: 253).

Salah satu faktor yang juga dapat mempengaruhi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah Surat Pemberitahuan (SPT) Masa yang merupakan laporan bulanan yang dapat disimpulkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terutang. SPT Masa disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak dimana Wajib Pajak terdaftar paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir (Mardiasmo, 2013: 154). Surat ini merupakan wadah untuk Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak Pertambahan Nilai yang terutang. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak dimana Wajib Pajak terdaftar paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. Dari penjelasan di atas beberapa pakar lalu menyimpulkan bahwa Wajib Pajak atau dalam hal ini adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa berimplikasi pada peningkatan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). (Siti Kurnia Rahayu, 2017: 272).

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk meneliti seberapa besar pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak dan Surat Pemberitahuan Masa terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, maka dari itu penulis mengangkat judul **"Keterkaitan Antara Jumlah Pengusaha Kena Pajak Dan Realisasi Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai Berdasarkan Surat Pemberitahuan Masa Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai".**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan pada latar belakang di atas, maka penulis mengidentifikasikan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) mengalami peningkatan di beberapa bulan tetapi di bulan yang

sama realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mengalami penurunan, dan begitu juga sebaliknya.

2. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa mengalami peningkatan di beberapa bulan tetapi di bulan yang sama realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mengalami penurunan, dan begitu juga sebaliknya.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka penulis mencoba merumuskan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Seberapa besar pengaruh Surat Pemberitahuan Masa terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran tentang bagaimana pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak dan Surat Pemberitahuan Masa PPN terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Surat Pemberitahuan (SPT) Masa terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Praktis

Kegunaan penelitian ini adalah untuk memecahkan masalah tentang hal-hal yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, jumlah wajib pajak dan penerimaan pajak.

1.5.2 Kegunaan Akademis

Hasil penelitian ini digunakan sebagai pengembangan ilmu melalui pengujian empiris dan konsep-konsep yang telah diharapkan dapat membuktikan kembali teori-teori penelitian terdahulu mengenai:

1. Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Pengaruh Surat Pemberitahuan (SPT) Masa terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pengusaha Kena Pajak

2.1.1.1 Pengertian Pengusaha Kena Pajak

Menurut Siti Resmi (2013: 25), menyatakan bahwa:

> "Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah wajib pajak yang melakukan kegiatan transaksi barang dan jasa yang dikenai pajak berdasarkan undang-undang tahun 1984 batasannya berdasarkan keputusan Menteri Keuangan kecuali wajib pajak yang memutuskan untuk dijadikan sebagai PKP".

Sedangkan menurut Menurut Sardana (2014: 26) pengertian pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan kegiatan transaksi yang dikenai pajak berlandaskan dari undang-undang perpajakan yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2.1.1.2 Pengusaha Kena Pajak

Indikator Pengusaha Kena Pajak dalam penelitian ini menggunakan dasar teori dari Sardana (2014: 26) yang

mengatakan pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan kegiatan transaksi yang dikenai pajak berlandaskan dari undang-undang perpajakan yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Penentuan indikator ini juga didasari atas dasar pemikiran Siti Kurnia Rahayu (2017: 252) yang mengatakan bahwa:

> "Semua wajib pajak yaitu pengusaha yang kegiatannya masuk ke dalam Pajak Pertambahan Nilai berlandaskan undang-undang perpajakan Pajak Pertambahan Nilai harus mendaftar dan dikukuhkan menjadi seorang PKP".

Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis menentukan indikator dari Pengusaha Kena Pajak yaitu besarnya jumlah Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar pada KPP.

2.1.2 Surat Pemberitahuan Masa

2.1.2.1 Pengertian Surat Pemberitahuan Masa

Menurut Suparmono dan Theresia (2015:24):

> "Surat Pemberitahuan (SPT) Masa adalah sarana yang digunakan oleh wajib pajak untuk menghitung, melaporkan, serta membayar kewajiban perpajakannya baik itu objek pajak, bukan objek pajak, dan juga harta serta kewajiban menurut undang-undang perpajakan."

Sedangkan menurut Siti Resmi (2014: 43) SPT Masa adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan pelaporan atas pembayaran pajak dalam kurun waktu bulanan."

2.1.2.2 Indikator Surat Pemberitahuan Masa

Indikator Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dalam penelitian ini menggunakan dasar pemikiran Edi Irianto, dkk (2013: 232) bahwa:

> "Dalam melaporkan pajak melalui SPT dengan 2 jenis yaitu SPT Tahunan dan SPT Masa yang dilaporkan langsung kepada Kantor Pelayanan Pajak sekitar, paling lama yaitu 20 hari setelah pajak sudah berakhir".

Indikator Surat Pemberitahuan Masa pada penelitian ini juga menggunakan dasar pemikiran Ferra Pujiyanti (2015: 43) bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dihitung sendiri oleh PKP dan harus dilaporkan dalam SPT Masa kepada Kantor Pelayanan Pajak sekitar, paling lama 20 hari setelah pajak sudah berakhir.

Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis menentukan indikator dari Surat Pemberitahuan Masa yaitu jumlah Surat Pemberitahuan Masa yang dilaporkan kepada Kantor Pelayanan Pajak sekitar.

2.1.3 Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

2.1.3.1 Pengertian Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Amiruddin Idris (2016: 50) bahwa penerimaan pajak adalah setiap sumber penerimaan negara melalui pajak atas penerimaan pajak dalam negeri dan pajak perdagangan secara internasional.

Sedangkan menurut Mardiasmo (2013: 273) menyebutkan bahwa PPN merupakan pajak yang peredarannya melalui produsen ke konsumen atas setiap pertambahan nilai barang dan jasa kena pajak.

Berdasarkan pernyataan para ahli di atas maka dapat dikatakan bahwa Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai adalah sumber penerimaan negara yang terdiri dari semua pajak atas barang kena pajak/jasa kena pajak yang dikonsumsi di dalam daerah pabean (dalam negeri).

2.1.3.2 Indikator Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Indikator Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dalam penelitian ini menggunakan dasar pemikiran (Siti Resmi, 2016: 3):

> "Sebagai sumber penerimaan negara melalui pajak, pemerintah selalu mengusahakan memasukan dana atau uang semaksimal mungkin untuk masuk ke dalam kas negara. Cara yang dilakukan adalah melalui ekstensifikasi dan

intensifikasi pajak, seperti contohnya PPN."

Indikator Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada penelitian ini juga menggunakan dasar pemikiran Waluyo (2014: 5) menyatakan bahwa agar tujuan negara yaitu melakukan peningkatan kesejahteraan masyarakat maka pemerintah memerlukan dana yang berasal dari pajak termasuk PPN.

Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis menentukan indikator dari Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai yaitu jumlah realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut Sukardji (2013:54):

"Apabila pengusaha yang dikukuhkan statusnya menjadi PKP semakin banyak maka akan meningkatkan kegiatan transaksi barang dan jasa kena pajak sehingga bisa berpotensi meningkatkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)".

Menurut Dwi Sunar (2012: 134) menyatakan bahwa PKP harus melaporkan kewajiban perpajakannya yang dibuatkan di faktur pajak dan masuk ke kas negara atau masuk sebagai pendapatan negara dari pajak di bidang Pajak Pertambahan Nilai.

Hasil penelitian Gia Meidha Giani (2016: 5) juga menyimpulkan bahwa jumlah Pengusaha Kena Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan PPN. Dimana ketika jumlah pengusaha kena pajak mengalami peningkatan maka penerimaan pajak di bidang pajak pertambahan nilai pun akan meningkat.

2.2.2 Pengaruh Surat Pemberitahuan Masa terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017: 62) banyaknya pelapor SPT baik SPT Tahunan ataupun Masa akan berimplikasi pada peningkatan penerimaan negara di bidang perpajakan. Beliau juga menyatakan bahwa untuk mencapai penerimaan pajak yang ada pada RAPBN, diharapkan untuk wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan melaporkan pajaknya di Surat Pemberitahuan.

Ahmad Prayudi (2010: 14) melakukan penelitian yang bertujuan untuk menguji pengaruh Surat Pemberitahuan Masa terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada KPP Medan Petisah. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan Masa berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN pada KPP Medan Petisah.

2.3 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka penulis mengambil keputusan sementara (hipotesis) sebagai berikut:

H1 : Pengusaha Kena Pajak (PKP) berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

H2 : Surat Pemberitahuan (SPT) Masa berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

III. Metodologi Penelitian

3.1 Metode Penelitian

Pada penelitian ini, metode yang digunakan peneliti adalah metode deskriptif dan metode verifikatif. Metode ini diharapkan dapat mengetahui hubungan yang signifikan antara variabel-variabel yang akan diteliti dan kemudian mendapatkan kesimpulan yang akan menjelaskan gambaran objek yang akan diteliti.

3.2 Operasionalisasi Variabel

Dalam penelitian ini variabel independen (X) yaitu:

a. Pengusaha Kena Pajak (PKP)

b. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa

Sedangkan variabel dependen (Y) dalam penelitian ini adalah penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

3.3 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa jumlah pengusaha kena pajak (PKP) yang terdaftar di KPP, jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) Masa yang dilaporkan pada KPP, dan jumlah nominal realisasi dari

penerimaan PPN pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega.

Teknik yang digunakan penulis dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan dokumentasi dan kepustakaan. Caranya dengan membaca buku-buku karangan para ahli yang berhubungan dengan variabel yang diteliti dan dengan mengumpulkan data-data yang telah diolah oleh pihak yang berwewenang menjadi informasi untuk mengolah data yang dibutuhkan.

3.4 Populasi, Sampel dan Tempat Serta Waktu Penelitian

3.4.1 Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah jumlah pengusaha kena pajak, surat pemberitahuan masa, dan jumlah nominal penerimaan yang berasal dari pajak atau realisasi penerimaan pajak pertambahan nilai yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega dari tahun 2015-2017.

3.4.2 Penarikan Sampel

Peneliti mendapatkan sampel dari data laporan realisasi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, jumlah pengusaha kena pajak dan surat pemberitahuan masa tahun 2015-2017. Jumlah sampel yaitu 36 laporan bulanan diperoleh dari data perbulan (12 bulan) dalam 3 periode mengenai jumlah surap pemberitahuan, jumlah pengusaha kena pajak terdaftar dan hasil realisasi jumlah penerimaan pajak pertambahan nilai yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega.

3.4.3 Tempat dan Waktu Penelitian

3.4.3.1 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan oleh peneliti pada pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega yang berlokasi di Jl. Soekarno Hatta No. 216 Babakan Ciparay, Kota Bandung, Jawa Barat 40223, Indonesia.

3.4.3.2 Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian ini dimulai dengan tahap persiapan sampai tahap pelaporan hasil penelitian atau dimulai pada Februari 2018 sampai dengan Agustus 2018.

3.5 Metode Pengujian Data

Pengujian data yang digunakan peneliti dalam melakukan analisa terhadap data yang didapat adalah dengan metode pendekatan kuantitatif dengan menggunakan analisis regresi linier berganda, uji asumsi klasik, uji korelasi, dan uji koefisien determinasi.

3.6 Hipotesis

H1: Pengusaha Kena Pajak (PKP) berpengaruh terhadap penerimaan PPN.

H2: Surat Pemberitahuan (SPT) Masa berpengaruh terhadap penerimaan PPN.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Pada bagian ini akan disajikan hasil penelitian dan pembahasan tentang pengaruh jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Metode analisis yang digunakan untuk mengolah data pada penelitian ini adalah analisis deskriptif dan verifikatif dengan menggunakan analisis regresi linier berganda untuk membantu mendapatkan kesimpulan.

4.1.1 Hasil Analisis Deskriptif

4.1.1.1 Gambaran Jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) dari tahun 2015-2017 dimana rata-rata jumlah PKP tertinggi sebesar 165,3 pada tahun 2017, sedangkan rata-rata jumlah PKP terendah sebesar 144,7 terdapat pada tahun 2015. Perkembangan Jumlah Pengusaha Kena Pajak dari tahun 2015-2017 mengalami peningkatan setiap tahunnya.

4.1.1.2 Gambaran Surat Pemberitahuan (SPT) Masa

Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dari tahun 2015-2017, dimana rata-rata SPT Masa tertinggi sebesar 65,0 terdapat pada tahun 2017, sedangkan rata-rata SPT Masa terendah sebesar 56,9 terdapat pada tahun 2015. Perkembangan SPT Masa dari tahun

2015-2017 mengalami peningkatan setiap tahunnya.

4.1.1.3 Gambaran Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tertinggi sebesar 19,495 miliar terdapat pada tahun 2017, sedangkan rata-rata Penerimaan PPN terendah sebesar 18,589 miliar terdapat pada tahun 2015. Perkembangan penerimaan PPN dari tahun 2015-2017 mengalami fluktuasi tetapi jika melihat *trendline* perkembangan penerimaan PPN cenderung mengalami peningkatan.

4.1.2 Hasil Analisis Verifikatif

4.1.2.1 Pengujian Asumsi Klasik

Pada bagian ini sebelum dilakukannya pembentukan model regresi, terlebih dahulu hal yang dilakukan adalah pengujian asumsi klasik sagar model yang terbentuk memberikan estimasi yang tidak bias dan akurat. Pengujian yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah uji normalitas, multikolinieritas, heteroskedastisitas dan autokorelasi.

a. Hasil Uji Normalitas

Berdasarkan tabel output, uji *Klomogrov-Smirnov*, diperoleh nilai signifikansi (Asymp. Sig. (2-tailed)) sebesar 0,343, dan lebih besar dari 0,05. Karena nilai signifikansi uji *Kolmogorov-Smirnov* lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa model regresi telah memenuhi asumsi normalitas.

b. Hasil Uji Multikolinieritas

Berdasarkan nilai VIF yang diperoleh, nilai *tolerance* kedua variabel bebas > 0,1 dan nilai VIF semua variabel < 10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas pada data.

c. Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan output yang diperoleh, hasil uji *scatterplot* terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar merata baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedaktisitas pada model regresi.

d. Uji Autokorelasi

Dari hasil perhitungan diperoleh angka DW sebesar 1,616. Setelah melihat tabel statistik Durbin-Watson (n=36 dan k=2), diperoleh batas bawah nilai tabel (d_L) = 1,354 dan batas atasnya (d_U) = 1,587. Berpedoman pada kriteria umum yang telah disebutkan diatas, karena nilai DW sebesar 1,616 berada diantara du (1,587) dan 4-d_U (2,413), maka dapat dipastikan tidak terdapat autokorelasi pada model regresi.

4.1.2.2 Analisis Linier Berganda

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel dapat di peroleh bentuk persamaan regresi linier berganda sebagai berikut: $Y = 9{,}039 + 0{,}033X_1 + 0{,}081X_2$.

Persamaan regresi linier berganda di atas dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

a. Artinya jika kedua variabel bebas (X) bernilai konstan (nol) maka Penerimaan PPN (Y) akan bernilai sebesar 9,039.
b. Artinya jika Jumlah Pengusaha Kena Pajak (X1) meningkat sebesar satu dan variabel lainnya konstan, maka Penerimaan PPN (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,033.
c. Artinya jika Surat Pemberitahuan Masa (X2) meningkat sebesar satu dan variabel lainnya konstan, maka Penerimaan PPN (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,081.

4.1.2.3 Analisis Korelasi Parsial

Hasil *output SPSS*, terlihat bahwa Hubungan antara Jumlah Pengusaha Kena Pajak dengan Penerimaan PPN adalah sebesar 0,708 termasuk dalam hubungan yang kuat, nilai korelasi bertanda positif yang menujukan hubungan yang terjadi adalah searah yang artinya setiap terjadi peningkatan Jumlah Pengusaha Kena Pajak akan meningkatkan Penerimaan PPN.

Hasil *output SPSS* terlihat bahwa Hubungan antara Penerimaan PPN dengan Penerimaan PPN adalah sebesar 0,639 termasuk dalam hubungan yang kuat, nilai korelasi bertanda positif yang menujukan

hubungan yang terjadi adalah searah yang artinya setiap terjadi peningkatan Penerimaan PPN akan meningkatkan Penerimaan PPN.

4.1.2.4 Analisis Koefisien Determinasi

Berdasarkan tabel, diperoleh informasi bahwa R-*square* sebesar 0,613 atau 61,3%. Nilai tersebut menunjukan bahwa Jumlah Pengusaha Kena Pajak dan Surat Pemberitahuan Masa secara simultan dalam memberikan pengaruh terhadap variabel Penerimaan PPN sebesar 61,3%. Sedangkan sisanya sebesar 100%-61,3% = 38,7% lainnya merupakan pengaruh dari variabel lain yang tidak diteliti.

Secara parsial berdasarkan perhitungan di atas, diketahui bahwa pengaruh terbesar 36,8% berasal dari variabel Jumlah Pengusaha Kena Pajak sedangkan variabel Surat Pemberitahuan Masa memberikan pengaruh sebesar sebesar 24,5%.

4.1.2.5 Pengujian Hipotesis Parsial

a. Pengujian Hipotesis Jumlah PKP terhadap Penerimaan PPN

Berdasarkan grafik 4.7 di atas dapat dilihat bahwa nilai t-hitung (4,184) variabel Jumlah Pengusaha Kena Pajak berada pada daerah penolakan H_0 atau daerah signifikan, hal ini berarti bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara Jumlah Pengusaha Kena Pajak terhadap Penerimaan PPN.

b. Pengujian Hipotesis Surat Pemberitahuan (SPT) Masa terhadap Penerimaan PPN

Berdasarkan grafik 4.8 di atas dapat dilihat bahwa nilai t-hitung (3,091) variabel Surat Pemberitahuan Masa berada pada daerah penolakan H_0 atau daerah signifikan, hal ini berarti bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara Surat Pemberitahuan Masa terhadap Penerimaan PPN.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Jumlah PKP terhadap Penerimaan PPN

Hasil pengujian uji t yang diperoleh menunjukkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima dikarenakan hasil uji t hitung lebih besar dibandingkan t tabel. Hasil ini dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara Jumlah Pengusaha Kena Pajak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Selain itu tedapat hasil yang positif antara dua variabel di atas dan dapat dikatakan bahwa terdapat hubungan yang searah antara Jumlah Pengusaha Kena Pajak dengan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, dimana jika Jumlah Pengusaha Kena Pajak meningkat maka penerimaan Pajak Pertambahan Nilai akan naik pula, artinya semakin banyak Jumlah Pengusaha Kena Pajak maka akan meningkatkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Sukardji (2013:54) yang mengatakan bahwa, semakin banyak pengusaha yang dikukuhkan statusnya menjadi pengusaha kena pajak maka otomatis kegiatan penyerahan Jasa Kena Pajak dan Barang Kena Pajak semakin banyak dan bisa membuka peluang meningkatnya penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Kemudian besar persentase dari nilai koefisien determinasi parsial variabel Jumlah Pengusaha Kena Pajak terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.yaitu sebesar 36,8% sedangkan sisanya sebesar 63,9% merupakan pengaruh yang diberikan oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti Nilai Tukar Rupiah dan Restitusi Pajak.

Hal tersebut membuktikan dan menjawab fenomena yang telah dikemukakan sebelumnya yaitu pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega pada tahun 2015-2017 yang pada beberapa bulan di dalamnya terjadi peningkatan Jumlah Pengusaha Kena Pajak namun penerimaan Pajak Pertambahan Nilai menurun. Wajar fenomena tersebut terjadi dikarenakan besarnya pengaruh variabel lain terhadap penerimaan Pajak Pertambahan

Nilai lebih besar. Penurunan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai bisa terjadi karena nilai tukar rupiah terhadap yang melemah terhadap mata uang asing atau terjadi depresiasi akan mengakibatkan kenaikan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Hal tersebut akan mempengaruhi daya beli masyarakat dikarenakan harga barang dan jasa mengalami kenaikan sementara tingkat pendapatan masyarakat yang cenderung konstan atau tetap. Yang artinya apabila daya beli masyarakat berkurang maka penerimaan pajak dalam sektor pajak pertambahan nilai juga akan menurun. Menurunnya penerimaan Pajak Pertambahan Nilai juga bisa disebabkan oleh restitusi pajak atau pengembalian pajak yang lebih bayar kepada wajib pajak yang tinggi dapat menyebabkan menurunnya penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Hasil penelitian ini pun menjelaskan bahwa Jumlah Pengusaha Kena Pajak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rohmasari Sitio (2015), serta Dwi Nuraeni (2011) yang menunjukkan bahwa Jumlah Pengusaha Kena Pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

4.2.2 Pengaruh Surat Pemberitahuan (SPT) Masa terhadap Penerimaan PPN

Hasil pengujian uji t yang diperoleh menunjukkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima dikarenakan hasil uji t hitung lebih besar dibandingkan t tabel. Hasil ini dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara Surat Pemberitahuan Masa terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Selain itu tedapat hasil yang positif antara dua variabel di atas dan dapat dikatakan bahwa terdapat hubungan yang searah antara Surat Pemberitahuan Masa dengan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, dimana jika Surat Pemberitahuan Masa meningkat maka penerimaan Pajak Pertambahan Nilai akan naik pula, artinya semakin banyak yang melapor Surat Pemberitahuan Masa maka akan meningkatkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Siti Kurnia Rahayu (2017: 62) yang menyatakan bahwa tingginya jumlah pelapor Surat Pemberitahun baik tahunan atau masa berimplikasi pada peningkatan penerimaan pajak.

Kemudian besar persentase dari nilai koefisien determinasi parsial variabel Surat Pemberitahuan Masa terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.yaitu sebesar 24,5% sedangkan sisanya sebesar 75,5% merupakan pengaruh yang diberikan oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti Nilai Tukar Rupiah dan Restitusi Pajak.

Hal tersebut membuktikan dan menjawab fenomena yang telah dikemukakan sebelumnya yaitu pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega pada tahun 2015-2017 yang pada beberapa bulan di dalamnya terjadi peningkatan pelaporan Surat Pemberitahuan Masa namun penerimaan Pajak Pertambahan Nilai menurun. Wajar fenomena tersebut terjadi dikarenakan besarnya pengaruh variabel lain terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai lebih besar. Penurunan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai bisa terjadi karena nilai tukar rupiah terhadap yang melemah terhadap mata uang asing atau terjadi depresiasi akan mengakibatkan kenaikan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Hal tersebut akan mempengaruhi daya beli masyarakat dikarenakan harga barang dan jasa mengalami kenaikan sementara tingkat pendapatan masyarakat yang cenderung konstan atau tetap. Yang artinya apabila daya beli masyarakat berkurang maka penerimaan pajak dalam sektor pajak pertambahan nilai juga akan menurun. Menurunnya penerimaan Pajak Pertambahan Nilai juga bisa disebabkan oleh restitusi pajak atau pengembalian pajak yang lebih bayar kepada wajib pajak yang tinggi dapat menyebabkan menurunnya penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

Hasil penelitian ini pun menjelaskan bahwa Surat Pemberitahuan Masa

berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Prayudi (2010) pada KPP Medan Petisah, serta Farida Khairani Lubis (2016) pada KPP Kota Medan yang menunjukkan bahwa Surat Pemberitahuan Masa berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah disajikan pada Bab IV, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Jumlah Pengusaha Kena Pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega tahun 2015-2017, dimana ketika Jumlah Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar naik maka akan meningkatkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.
2. Surat Pemberitahuan Masa berpengaruh positif terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega tahun 2015-2017, dimana setiap kenaikan Surat Pemberitahuan Masa yang dilaporkan maka akan meningkatkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

5.2 Saran

Setelah penulis memberikan kesimpulan dari hasil penelitian tentang pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak, Surat Pemberitahuan Masa, dan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai, maka penulis akan memberikan beberapa saran yang dapat digunakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega.

5.2.1 Saran Praktis

1. Untuk meningkatkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega melalui Pengusaha Kena Pajak disarankan untuk Kantor Pelayanan Pajak Bandung Tegallega lebih sering lagi melakukan penyuluhan kepada Wajib Pajak yang sudah memenuhi kriteria untuk mendaftar dan dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak agar jumlahnya meningkat dan realisasi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai ikut meningkat.
2. Untuk meningkatkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega melalui Surat Pemberitahuan Masa agar lebih baik lagi melakukan penyuluhan kepada Wajib Pajak agar dapat melaporkan Surat Pemberitahuan Masa agar mengisinya dengan benar dan tepat waktu sehingga dapat meningkatkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

5.2.2 Saran Akademis

1. Bagi Pengembangan Ilmu Akuntansi
   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dan pemahaman terkait pengaruh jumlah pengusaha kena pajak dan surat pemberitahuan masa terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai, serta sebagai masukan dan tambahan referensi ilmu akuntansi bagi para pembaca.
2. Bagi Peneliti Lain
   Bagi peneliti selanjutnya disarankan agar melakukan penelitian dengan metode yang sama tetapi dengan variabel yang berbeda, unit, dan sampel yang berbeda agar diperoleh kesimpulan yang mendukung teori dan konsep yang diterima secara umum.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Prayudi. 2010. *Pengaruh Surat Pemberitahuan Masa Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai: Studi Empiris pada KPP Medan Petisah.*. ISSN: 1907 – 4158.

Amiruddin, Idris. *2016*. *Ekonomi Publik*. Yogyakarta: CV: Budi Utama

Awan Nurmawan Nuh. 2013. "*Cabut Izin PKP, Bukti Keseriusan Ditjen Pajak Benahi PPN*". Melalui <https://www.merdeka.com/peristiwa/cabut-izin-pkp-bukti-keseriusan-ditjen-pajak-benahi-ppn.html>

Bambang Brodjonegoro. 2016. "*Restutisi Pajak 2015 Semakin Menggendut*". Melalui <http://nasional.kontan.co.id/news/restutisi-pajak-2015-semakin-menggendut>

Dwi Sunar Prasetyono. 2012. *Buku Pintar Pajak.* Yogyakarta: Laksana.

Edi Slamet *Irianto*. *2013*. *Pengantar Ilmu Pajak: Kebijakan dan Implementasi di Indonesia, Edisi 1-2*. Jakarta: Rajawali Pers.

Erly Suandi. 2014. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.

Farida Khairani Lubis. 2016, *Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak dan Surat Pemberitahuan Masa Terhadap Penerimaan Pajak PPN: Studi Empiris di KPP Kota Medan*. ISSN: 2089-8592.

Ferra Pujiyanti. 2015. *Rahasia Cepat Menguasai Laporan Keuangan Khusus Untuk Perpajakan dan UKM*. Jakarta: Lembar Langit Indonesia.

Ghozali, Imam. *2013*. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Edisi Ketujuh.* Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Gujarati. *2013*. *Dasar-dasar Ekonometrika Edisi Kelima.* Jakarta: Erlangga

Husein Umar. *2014*. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis. Edisi Kedua. Cetakan ke-13*. Jakarta: Rajawali Pers.

Mardiasmo. 2013. Perpajakan Edisi Revisi, Yogyakarta: Andi Offset

Siti Kurnia Kurnia. 2017. *Perpajakan: Konsep & Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains

Siti Resmi. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.

Siti Resmi. 2016. *Perpajakan: Teori dan Kasus. Edisi Revisi.* Jakarta: Salemba. Empat

Singgih Santoso. *2012*. *Panduan Lengkap SPSS Versi 20*. Jakarta: PT Elex Media.

Sardana. 2014. *Kenali Hak dan Kewajiban Perpajakan Anda*. Bandung: Alfabeta.

Sri Mulyani. 2017. "*Penerimaan Perpajakan 2017 Capai Rp 1.339 Triliun, 91% Dari Target*". Melalui <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3795760/penerimaan-perpajakan-2017-capai-rp-1339-triliun-91-dari-target>

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suharsimi Arikunto. *2013. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sumadi Suryabrata. *2013*. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.

Supramono & Theresia Woro. 2015. *Perpajakan Indonesia-Mekanisme dan Perhitungan*. Yogyakarta: CV ANDI

Umi Narimawati. 2010. *Metodologi Penelitian: Dasar Penyusun Penelitian. Ekonomi*. Jakarta: Genesis.

Waluyo. 2014. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Yon Arsal. 2017. "*Wajib Pajak Yang Melapor SPT Menurun*". Melalui <https://ekonomi.kompas.com/read/2017/05/05/231735626/wajib.pajak.yang.lapor.spt.menurun>